



**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PEMENUHAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA**

(Studi kasus Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

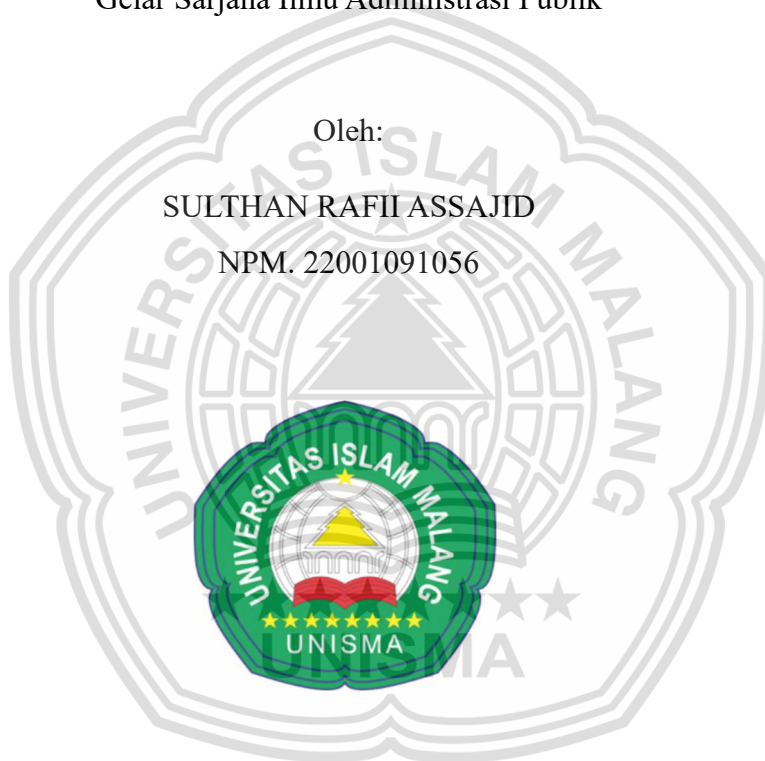
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

SULTHAN RAFII ASSAJID

NPM. 22001091056



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2024

RINGKASAN

Sulthan Rafii Assajid, 2023, **Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dan Pemenuhan *Sustainable Development Goals* Desa (Studi Kasus Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**. Pembimbing: (1) Dr. Khoiron S.AP. M.IP. (2) Retno Wulan Sekarsari S.AP. M.AP. M.Pol.Sc

Desa Landungsari sebagai desa dengan tingkat capaian SDGs Desa dengan rata-rata 40,53 menerapkan kebijakan pembangunan desa yang jika di sunting dalam empat dimensi keberlanjutan atau prism of sustainability yakni institusi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi institusi dimana institusi berperan sebagai pembentuk kebijakan, Desa Landungsari ditunjukkan telah membuka ruang partisipasi terhadap masyarakat desa, serta juga mengikuti dan mengacu pada kondisi desa dalam pembuatan kebijakan, dimulai dari pembuatan RPJMDesa, RKPDes, dan APBDes. Dalam dimensi ekonomi Desa Landungsari memiliki BUMDes dengan 4 unit usaha yaitu: unit usaha bank sampah, Unit Usaha Pertanian dan Perikanan, Unit Usaha Simpan Pinjam, dan unit Usaha Pasar Desa, dimana pesardesa sebagai penyumbang PAD terbesar Desa Landungsari setiap tahunnya, unit bank sampah juga melakukan kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah di setiap dusunnya dalam rentan waktu 2 minggu, unit usaha pertanian dan perikanan menyokong petani melalui kelompok tani, meski perhatian pemerintah desa hanya berupa insentif kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok tani saja. Selain itu pemerintah desa juga menganggarkan perbaikan jalan guna menyokong kegiatan ekonomi maupun keseharian masyarakat.

Dalam dimensi sosial pemerintah desa mendukung pendidikan, kesehatan, keterlibatan perempuan dan taraf hidup masyarakat desa. Desa Landungsari memiliki PAUD, TK, dan TPQ, desa juga memiliki Pos Kesehatan Desa, penyelenggaraan Posiandu, penyuluhan dan pelatihan di bidang Kesehatan, pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita, serta insentif bagi tenaga Kesehatan desa. desa juga mendukung peran perempuan desa melalui PKK. Sedang dalam dimensi lingkungan Desa Landungsari belum benar-benar serius dalam pengolahan lingkungan di desa. belum ditemukan kebijakan yang serius dalam pelestarian lingkungan, dari segi pengolahan sampah sebagaicontoh, Desa Landungsari baru memiliki program bank sampah yang melakukan kegiatan pemisahan dan pengumpulan sampah saja, dan belum dalam tahap pengolahan lebih lanjut. Disisi lain ditemukan data IDM yang menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air, tanah dan udara di desa sangat kecil, meski pada kenyataannya belum di temukan tindakan serius pemerintah daerah dalam melakukan konservasi terhadap air, tanah maupun udara, meski terdapat komitmen pemerintah desa untuk mengembangkan kebijakan guna terwujudnya keberlanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs Desa

SUMMARY

Sulthan Rafii Assajid, 2023, **Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dan Pemenuhan *Sustainable Development Goals* Desa (Studi Kasus Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**. Pembimbing: (1) Dr. Khoiron S.AP. M.IP. (2) Retno Wulan Sekarsari S.AP. M.AP. M.Pol.Sc

Landungsari Village, as a village with an average Village SDGs achievement level of 40.53, implements village development policies which are edited in four dimensions of sustainability or the prism of sustainability, namely institutional, social, economic and environmental. In the institutional dimension where institutions play a role as policy makers, Landungsari Village is shown to have opened up space for participation for village communities, as well as following and referring to village conditions in policy making, starting from making the RPJMDesa, RKPDes, and APBDDes. In the economic dimension, Landungsari Village has a BUMDes with 4 business units, namely: the waste bank business unit, the Agriculture and Fisheries Business Unit, the Savings and Loans Business Unit, and the Village Market Business unit, where pesardesa is the largest contributor to the PAD of Landungsari Village every year, the waste bank unit is also carrying out waste collection and sorting activities in each hamlet within a period of 2 weeks, the agriculture and fisheries business unit supports farmers through farmer groups, even though the village government's attention is only in the form of incentives for the needs needed by farmer groups. Apart from that, the village government also budgets for road repairs to support the community's economic and daily activities.

In the social dimension, the village government supports education, health, women's involvement and the standard of living of village communities. Landungsari Village has PAUD, TK and TPQ, the village also has a Village Health Post, holding Posiandu, counseling and training in the health sector, providing additional food for the elderly and toddlers, as well as incentives for village health workers. The village also supports the role of village women through the PKK. Meanwhile, in the environmental dimension, Landungsari Village is not really serious about environmental management in the village. There has not yet been a serious policy in preserving the environment, in terms of waste processing, for example, Landungsari Village only has a waste bank program which only carries out waste separation and collection activities, and is not yet in a further processing stage. On the other hand, IDM data was found which shows that the level of water, soil and air pollution in the village is very small, even though in reality there has not been any serious action by the local government in conserving water, land or air, even though there is a commitment from the village government to develop policies to realize this. continuity.

Keywords: Policy, Sustainable Development, Village SDGs

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara dengan wilayah yang begitu luas, terbagi menjadi banyak pulau, serta juga terbagi menjadi banyak macam daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara yang telah terbebas dari predikat negara berkembang, Indonesia tetap memiliki komponen penting yang tentunya tidak dapat dilepasakan yakni desa. Tercatat menurut data BPS 43% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan per tahun 2020 (Rizaty, 2021).

Desa sebagai komponen terkecil dalam pemerintahan mengalami perubahan yang signifikan dalam kedudukannya. Semenjak diterapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang mengatur secara spesifik tentang desa, serta memberikan kejelasan yang lebih spesifik tentang status desa, membentuk pemerintahan desa yang professional efisien dan efektif. Dengan adanya undang-undang ini paradigma pembangunan desa menjadi berubah, dimana sebelumnya status desa yang kurang jelas dan hanya diatur melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang desentralisasi (Rauf dan Maulidah, 2015: 1-8).

Pembuatan undang-undang tentang desa ini menunjukkan sebuah keseriusan akan besarnya potensi yang bisa di kembangkan oleh desa. Desa sebagai ruang teritoris terkecil memiliki kompleksitas persoalan sosial-

ekonomi sebagai basis untuk mengidentifikasi berbagai problematika Pembangunan (Singgih dan Nirwana, 2016: 572). Jika di bandingkan dengan daerah perkotaan wilayah desa cenderung memiliki jumlah kemiskinan yang lebih tinggi, tingkat Pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah, serta daya beli masyarakat yang lebih rendah pula.

Meski begitu, fakta menunjukkan bahwa ketahanan sosial dan ekonomi di pedesaan sangat tangguh menghadapi krisis dalam berbagai macam momentum. Ditambah lagi dalam aspek kewilayahan kementerian dalam negeri (2019) menunjukkan bahwa 91% wilayah Indonesia merupakan pedesaan. Sehingga Pembangunan yang berfokus kepada daerah pedesaan merupakan hal yang begitu harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat potensi desa yang begitu vital (Iskandar, 2020: 19-20). Maka tidak heran desa yang dianggap sebagai pemukiman kecil sangat vital dampaknya bagi keberlangsungan negara, karna memang dalam kurun waktu tersebut sudah terbukti adanya kekuatan desa, dalam menggambarkan kondisi Indonesia.

Paradigma yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuat desa yang sebelumnya selalu menjadi objek Pembangunan, kini menjadi subjek utama Pembangunan desa. Merujuk dari hal tersebut maka perlu ditelaah kembali sejauh mana undang-undang ini berdampak pada Pembangunan di tingkat desa dan selebihnya kontribusi desa dalam pembangunan nasional (Iskandar, 2020: 35-36). Status yang jelas yang di berikan negara melalui undang-undang ini juga memberikan akses

keuangan yang tidak sedikit pada desa, hal ini menyebabkan arah pembangunan desa perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga pembangunan desa dapat maksimal serta optimal, terlebih lagi dapat juga bersifat berkelanjutan. Sehingga daripada itu, pembangunan desa perlu menerapkan prinsip-prinsip dalam Pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan tiga pilar yakni pilar sosial, ekonomi serta juga pilar lingkungan.

Pada sisi lainnya, semenjak adanya kejelasan status desa, indeks Pembangunan desa juga turut meningkat. Meski begitu desa belum memiliki tujuan yang jelas dalam pembangunannya, sehingga dapat diringkas bahwa sangat dibutuhkan saat ini arah Pembangunan yang lebih sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Lebih detail mencakup metode substansi hingga kemudian tujuan akhir.

Melanjutkan dari permasalahan ini, *sustainable development goals* (SDGs) yang di terjemahkan dalam bahwa Indonesia sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menggabungkan seluruh konsep Pembangunan yang pernah dibuat sebelumnya selama ini, mulai dari Pembangunan social, Pembangunan ekonomi, Pembangunan lingkungan, realisasi terhadap bencana, kependudukan dan sebagainya. Dimana konsep ini lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan. TPB yang tercantum dalam Perpres 59/2017, yang menjelaskan tentang Pembangunan di level nasional memiliki 319 indikator dalam 17 cakupan yang berbeda.

Dalam penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan tujuan global, Indonesia melakukan penyesuaian tujuan dari hulu ke hilir sehingga semua tingkatan pemerintahan dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan ini. Tidak terkecuali desa, dimana Indonesia tentunya mengetahui potensi desa dalam menyongsong keberhasilan pencapaian SDGs, terutama setelah penerapan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 yang mengubah paradigma Pembangunan desa (Iskandar, 2020: 15-18).

Dalam pemerintahan Indonesia sendiri, kepentingan SDGs langsung di tempatkan dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 13 Tahun 2020 tentang prioritas Pembangunan dana desa tahun 2021 serta Permendesa no 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan cakupan dari semula 17 bertambah menjadi 18 cakupan tujuan. Adanya tambahan tujuan ke 18 yakni kelembagaan desa yang dinamis, sekaligus untuk menonjolkan ciri khas dari setiap desanya (Iskandar, 2020: 80-98).

Mengacu pada kondisi ini maka sudah seharusnya desa, melalui pemerintah desa mengedepankan program-program dalam mendukung dan menyukseskan SDGs desa. Tentunya perlu juga Pembangunan skala desa mengedepankan sebuah prinsip Pembangunan berkelanjutan. Dimana Pembangunan skala desa perlu mengedepankan 1) Dimensi Ekonomi, 2) Dimensi Lingkungan, 3) Dimensi Sosial, 4) Dimensi Institusional dengan membangun tiga aspek utama yakni manusia, ekonomi, dan sosial. Serta

juga melestarikan dan dijaga yaitu alam (*nature*), penunjang (*life support*), dan Masyarakat (*community*) (Pertiwi, 2017: 9-14).

Desa Landungsari Kabupaten Malang merupakan desa yang bertempat pada pinggiran kota Malang. Dimana desa ini merupakan desa yang tergolong sebagai desa mandiri dengan skor Indeks Desa Membangun (IDM) 0,8879 dari 1,000. Desa ini memiliki banyak sektor ekonomi, pengelolaan lingkungan, UMKM, serta banyaknya mahasiswa yang menempuh Pendidikan disekitaran desa ini, menjadikan Desa Landungsari menjadi desa yang berkembang baik, belum lagi dengan adanya badan usaha milik desa (BUMDes) yang menguatkan ekonomi desa (Ramadana, Ribawanto, Suwando, 2013: 1068-1076)

Dalam hubungannya dengan SDGs Desa, IDM di kategorikan menjadi beberapa indikator yang terkait erat, hal ini dijelaskan oleh Fajar dkk. (2022) yang melakukan eksplorasi terhadap variabel dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dalam hubungan keterkaitannya ke-18 SDGs Desa memiliki keterkaitan dengan IDM sebagaimana berikut

Tabel 1.1: Hubungan SDGs Desa dengan Dimensi Dalam IDM

No.	SDGs Desa	Dimensi Dalam IDM
1.	Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan	-
2.	Desa Ekonomi Tumbuh Merata	<ul style="list-style-type: none">• Keragaman Produksi• Perdagangan• Akses Distribusi• Lembaga Ekonomi• Keterbukaan Wilayah
3.	Desa Peduli Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none">• Pemukiman
4.	Desa Peduli Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas Lingkungan• Potensi dan Tanggap Bencana
5.	Desa Peduli Pendidikan	Pendidikan
6.	Desa Ramah Perempuan	Modal Sosial
7.	Desa Berjejaring	-
8.	Desa Tanggap Budaya	-

Sumber; data yang telah diolah oleh penulis 2024

Meski dengan capaian IDM begitu tinggi, capaian yang terdapat dalam data SDGs desa yang diterbitkan oleh kemendes, menunjukkan adanya kekurangan dalam pengoptimalan pencapaian SDGs, meski tentu dalam beberapa poin SDGs Desa Landungsari dapat mencatatkan nilai yang baik, dalam skala 0-100 berikut data SDGs Desa di Desa Landugsari.

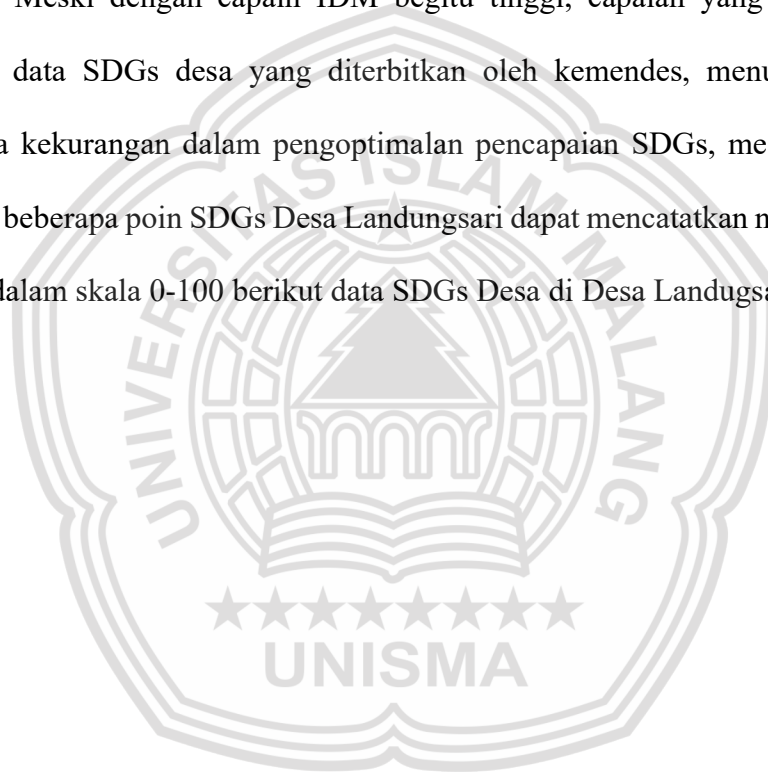
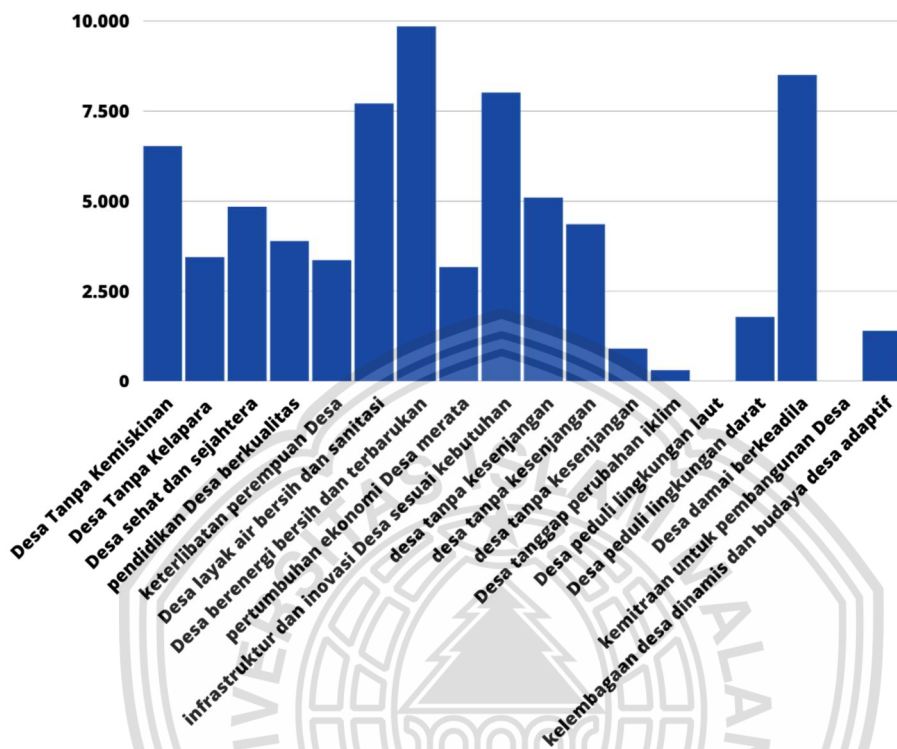


Table 1. 2 Data Capaian SDGs Desa, Desa Landungsari



Sumber: SID Kemendes [SDGs Desa | Sistem Informasi Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id),

Diakses Pada 16 Oktober 2023

Melihat dari tabel di atas, tingkat capaian SDGs desa sangat fluktuatif, namun rata-rata capaian masih ada di bawah angka 75%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian SDGs Desa di beberap sektor masih kurang optimal. Selanjutnya program-program yang ada pada Desa Landungsari di rasa sudah menuju pencapaian SDGs Desa, sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Mufarrih Kepala Urusan Perencanaan Desa Landungsari pada tanggal 25 september 2023 dalam kesempatan wawancara bersama peneliti

“Adanya SDGs ini sebenarnya hanya sebagai legitimasi dari apa-apa yang sudah kami lakukan di desa, jauh sebelum SDGs ini di sepakati, kami sudah memiliki program-program seperti itu” (Hanaur, 2023).

Melihat kondisi ini, penulis menemukan setidaknya dua permasalahan utama atau *gap* permasalahan yang menjadi konsentrasi penulis, yang kemudian dua permasalahan ini menjadi bahan ukur dalam pembahasan sehingga permasalahan ini dapat dipecahkan kebenarannya, kedua permasalahan tersebut di perinci sebagai berikut :

1. Angka optimal SDGs Desa yang belum tercapai

Seperti yang dapat dilihat pada table 1.1 di atas, skor pemenuhan SDGs Desa pada desa memiliki rata-rata dibawah 75.00 dan memiliki rata-rata yang masih pada angka 40,53 yang diberikan indicator warna merah pada Sistem Informasi Desa (SID) hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan ataupun peningkatan kebijakan Pembangunan dalam rangka mensukseskan SDGs Desa ini

2. Ukuran Ketercapaian SDGs Desa Belum Sesuai Dengan Kenyataan

Ukuran ketercapaian indicator SDGs secara Nasional tercantum dalam lampiran Perpres Nomer 59 Tahun 2017, namun terkhusus SDGs Desa tidak tecantum secara khusus melalui Permendesa Nomer 21 Tahun 2020 melalinkan disesuaikan dengan kondisi desa sebagaimana termagtub dalam Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi

“Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarakan pada Sistem Informasi Desa.”

Dari data capaian SDGs Desa yang diakses melalui laman SID capaian SDGs Desa Landungsari mencolok pada beberapa aspek saja yang dirasa sesuai dengan kebutuhan desa meski begitu ketercapaian ini dirasa kurang sesuai jika di pandang dalam segi pembangunan berkelanjutan menurut Spangenberg & valentine (2000) yang mengedepankan empat dimensi utama yakni dimensi institusional, dimensi lingkungan, social seta ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada kajian yang telah dilakukan peneliti di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kebijakan Pembangunan yang dilakukan di Desa Landungsari kecamatan Dau, Kabupaten Malang dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan?
2. Apakah arah kebijakan Pembangunan Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang benar-benar mengarah pada pemenuhan SDGs Desa?

C. Tujuan Penelitian

Menurut dari rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan diatas, maka jelas tujuan penelitian yang dilakukan peneliti yakni untuk

1. mengetahui serta mengukur kebijakan pembangunan yang di terapkan dalam kebijakan Pembangunan Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan menggunakan perspektif Pembangunan berkelanjutan

2. menilai kebijakan Pembangunan Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam rangka agenda pemenuhan SDGs Desa.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada latar belakang permasalahan, rumusan masalah serta juga tujuan penelitian. adapula manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu manfaat teoritis untuk dunia Pendidikan serta manfaat praktis, untuk dunia akademik serta manfaat praktis, keduanya di perinci sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang membutuhkan hasil penelitian ini, serta juga dapat menambah wawasan bagi pembacanya secara umum dan terkhusus kontribusi keilmuan pada bidang Ilmu Administrasi Publik.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia Pendidikan, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait kebijakan berkelanjutan
- b. Harapannya penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat menjadi masukan kepada pihak terkait atau pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan serta peningkatan kinerja di sektor Pembangunan, khususnya Pembangunan berkelanjutan.

E. Sistematika penulisan

a. BAB I: Pendahuluan

Berisikan latarbelakang permasalahan dilekukannya penenelitian, rumusan masalah dari penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, serta tujuan dilakukannya penelitian.

b. BAB II: Kajian Pustaka

Berisi tinjauan dari penelitian terdahulu, serta juga penjelasan tentang teori-teori, dan peraturan yang akan di gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

c. BAB III: Metode Penelitian

Berisi penjelasan tentang metode yang di gunakan dalam melakukan penelitian, serta dalam memaparkan hasil temuan penelitian. Juga menjelaskan bagaimana proses pengolahan data dilakuakan sehingga didapatkan data yang valid.

d. BAB IV: Gambaran dan setting penelitian

Bercerita tentang bagaimana kondisi lokus penelitian di sesuaikan dengan fokus yang diambil dalam penelitian.

e. BAB V: Temuan temuan

Berisi temuan peneliti akan menjawab rumusan masalah yang telah di angkat dalam bab 1, sehingga temuan-temuan ini merupakan data-data penting dalam melakukan analisis

f. BAB VI: Analisis pembahasan

Berisi tentang analisis dari temuan penelitian, dimana pisau analisis yang digunakan merupakan teori yang sudah di paparkan dalam BAB 2.

g. BAB VII: Kesimpulan dan saran

Berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada didalam tulisan, serta saran dari kekurangan dalam temuan yang bisa menjadi rujukan perbaikan.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan pembangunan perlu kiranya memandang berbagai aspek, dan sebagai hal utama pembangunan perlu mengedepankan keberlanjutan yang mengandung aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini di tujukan guna memastikan sumberdaya yang kita miliki di muka bumi dapat digunakan dalam jangka waktu yang tak terbatas, atau setidaknya dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula dengan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai desa mandiri belum dapat menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan secara maksimal. Kendati kebijakan yang diambil pemerintah desa sudah mengarah menuju pemenuhan SDGs Desa, kebijakan pembangunan perlu ditingkatkan Kembali, hal ini sangat dimungkinkan melihat konsidi sumberdaya alam dan manusia yang ada didesa, sumberdaya pendanaan yang dapat di katakana besar, dangat memungkinkan terbentuknya suatu siklus keberlanjutan dalam skala desa. tidak dapat di pungkiri juga bahwasanya adanya hambatan-hambatan dalam pembangunan menjadi perolematika tersendiri yang perlu dipecahkan bersama-sama.

Sebagaimana yang telah di papakarkan sebelumnya ketercapaian pembangunan berkelanjutan yang diukur melalui indicator-indikator terkait di desa landungsari menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap kelestarian sumberdaya alam desa. kurangnya inovasi kebijakan desa menjadi

salah satu faktor penting yang perlu ditingkatkan dalam pemenuhan keberlanjutan. Kendati begitu dalam ukuran yang ditetapkan melalui Menteri Desa pembangunan di desa landungsari masuk kedalam tahap yang baik, dimana kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan tentunya sudah sesuai dengan arahan peraturan Menteri.

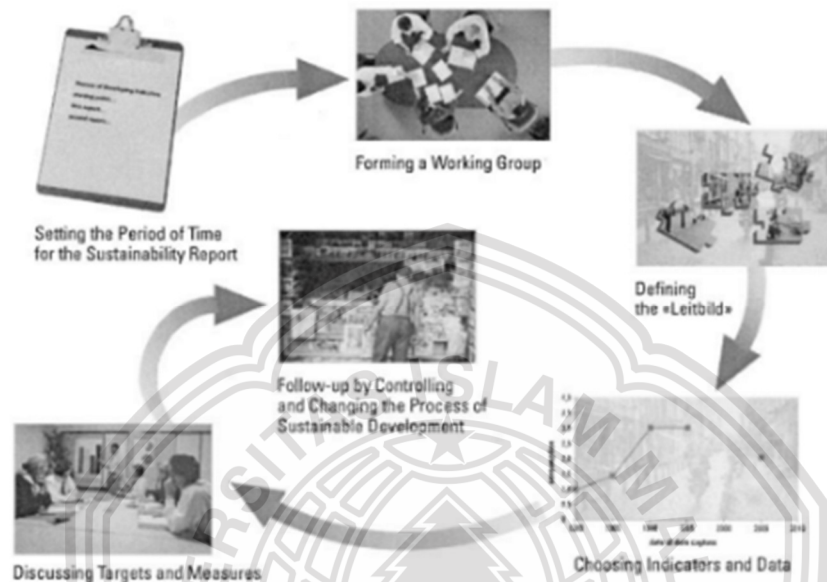
B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan pemerintah Desa Landungsari dapat melakukan beberapa hal guna mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan di desa

1. Melakukan kajian terhadap kondisi lingkungan desa sehingga pemerintah desa mengetahui cadangan sumberdaya desa dan mengetahui tindakan lebih lanjut yang akan diturunkan sebagai kebijakan pembangunan desa.
2. Berinovasi dalam kebijakan pembangunan khususnya guna mendorong keberlanjutan, dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan, sebagai contoh pembatasan penggunaan plastik di lingkungan pasar, pengolahan sampah berkelanjutan, dan lain sebagainya.

Secara lebih terperinci sebagaimana dijelaskan oleh Valentin & Spangenberg (2000) dalam pembuatan kebijakan perlu mengarungi beberapa tahapan guna mendorong pembangunan berkelanjutan sebagai mana berikut

Gambar 7.1 proses pembangunan dan penggunaan indikator



Sumber: Valentin, A., & Spangenberg, J. H. (2000). *A guide to community sustainability indicators. Environmental impact assessment review, 20(3)*,

Dalam penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan di perlukan tahap-tahap yang terstruktur yakni:

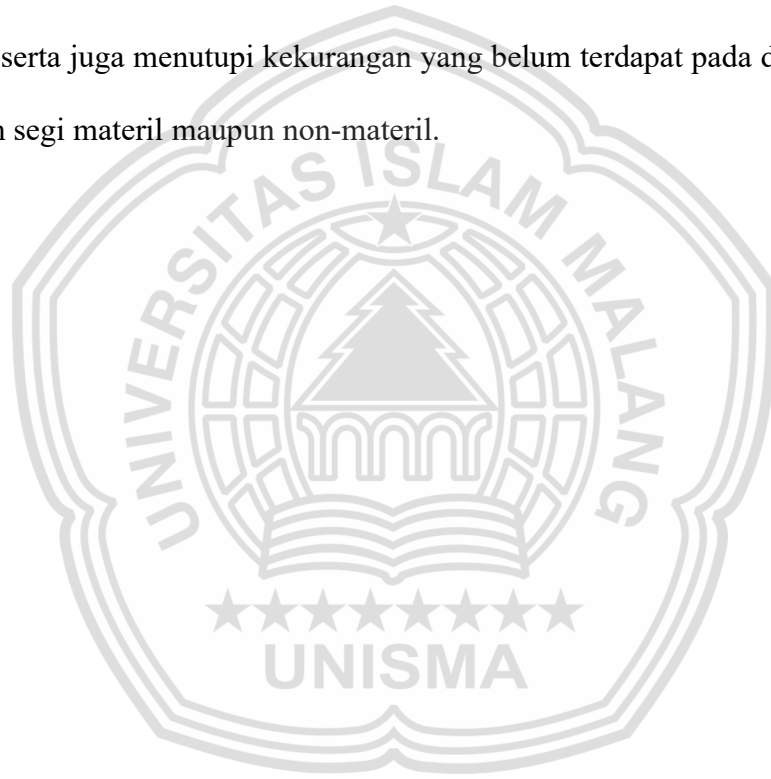
- a. Identifikasi Tujuan: Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan dari pengembangan indikator keberlanjutan komunitas. Ini melibatkan memahami apa yang ingin dicapai oleh komunitas tersebut dalam hal keberlanjutan, baik itu dalam bidang lingkungan, ekonomi, maupun sosial.
- b. Pemilihan Pendekatan: Setelah tujuan ditetapkan, pemilihan pendekatan dalam pengembangan indikator menjadi krusial. Ada

beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti pendekatan berbasis teori, berbasis partisipatif, atau kombinasi dari keduanya.

- c. Identifikasi Indikator: Proses berikutnya adalah identifikasi indikator yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti indikator lingkungan, ekonomi, sosial, atau budaya. Pemilihan indikator harus mempertimbangkan keberagaman dan kebutuhan komunitas yang bersangkutan.
- d. Penyusunan Indikator: Setelah indikator- indikator terpilih, langkah berikutnya adalah menyusunnya secara rinci. Ini mencakup definisi indikator, cara pengukuran, sumber data, dan frekuensi pemantauan. Penting untuk membuat indikator yang mudah dimengerti dan dapat diukur dengan jelas.
- e. Pengujian dan Validasi: Sebelum indikator diimplementasikan secara luas, mereka perlu diuji dan divalidasi untuk memastikan bahwa mereka dapat mengukur apa yang diinginkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
- f. Implementasi: Setelah melalui proses pengujian dan validasi, indikator dapat diimplementasikan dalam praktik. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil menggunakan indikator yang telah ditetapkan.
- g. Evaluasi dan Revisi: Proses pengembangan indikator keberlanjutan komunitas tidak berhenti pada implementasi. Evaluasi terus-menerus

diperlukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan tetap relevan dan efektif. Jika diperlukan, indikator dapat direvisi atau ditambahkan sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam komunitas.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain baik swasta, maupun pemerintahan. Hal ini dilakukan guna memberikan tambahan wawasan bagi desa, serta juga menutupi kekurangan yang belum terdapat pada desa baik dalam segi materil maupun non-materil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bogdan, R., & Taylor, J. S. (1975). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Remadja Karya*.
- Brandon, P. S., & Lombardi, P. (2010). *Evaluating sustainable development in the built environment*. John Wiley & Sons.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kiteley, R., & Stogdon, C. (2013). *Literature reviews in social work*. Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. (2016). *Qualitative Research Methodology. Revised Edition, Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Mudacumura, G. M., Mebratu, D., & Haque, M. S. (Eds.). (2017). *Sustainable development policy and administration*. Routledge.
- Munasinghe, M. (1993). *Environmental economics and sustainable development* (Vol. 3). World Bank Publications.
- Pertiwi, N. (2017). Implementasi Sustainable Development di Indonesia.
- Spangenberg, J. H., & Bonniot, O. (1998). *Sustainability indicators: a compass on the road towards sustainability*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future* Oxford. UK: Oxford University Press.

Jurnal

- Adamowicz, M., & Zwolińska-Ligaj, M. (2020). The “Smart Village” as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland. *Sustainability*, 12(16). <https://doi.org/10.3390/su12166503>
- Environment, M. K.-, Sustainability, D. and, & 2005, undefined. (2004). Re-emphasizing sustainable development—The concept of “Evolutionability” On living chances, equity, and good heritage. *Springer*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-005-5737-4>
- Fajar, K. I. D., Rijanta, R., & Kurniawan, A. (2022). Eksplorasi Variabel Pembangunan Berkelanjutan untuk Indeks Desa Membangun Pulau Jawa. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 68. <https://doi.org/10.22146/mgi.73056>
- Indahyani, R., & Maga, L. (2023). Alternatif Kebijakan dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Papua. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 111–131. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/3386>
- Keiner, M. (2005). *History, definition (s) and models of sustainable development*. <https://doi.org/10.3929/ethz-a-004995678>
- Maulana, I. (2022). Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pencapaian SDGs Desa Di Desa Pende Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Tahun 2021. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(1), 86–105. <https://doi.org/10.31942/JLP.2022.1.1.7805>
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A., & Sihombing, N. (2022). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Citra Sosial Humaniora (CISHUM)*, 1(1), 1-11.
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Spangenberg, J. H. (2002). Environmental space and the prism of sustainability: frameworks for indicators measuring sustainable development. *Ecological indicators*, 2(3), 295-309.
- Sri Handayani, Syaiful Arif, Galih Moh.Husein, Siti Ayu Wulandari, & Muhammad Halimy. (2023). Capaian SDGs pada Institusi Pemerintah Desa (Studi Pencegahan Stunting di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang). *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2439>
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47532/JIC.V4I1.239>

- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>
- Tamrin, S. H., Sajidin, M., Nurdiah, Rakasiwi, F., & Anfas. (2023). Fasilitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Yang Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Betteng. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(3), 1071–1081. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i3.2943>
- Valentin, A., & Spangenberg, J. H. (2000). A guide to community sustainability indicators. *Environmental impact assessment review*, 20(3), 381-392.
- Van Den Berg, C., Van Bree, F., & Cottrell, S. (2004). PAN Parks implementation process: cross cultural comparison–Bieszczady & Slovenski Rajj National parks. *Policies, methods and tools for visitor management*, 222-229.

Website

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved October 31, 2023, from <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved October 31, 2023, from <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html>
- SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan - Google Play Buku. (n.d.). Retrieved October 31, 2023, from <https://play.google.com/books/reader?id=yfoIEAAQBAJ&pg=GBS.PR3>
- Struktur Organisasi | Website Desa Landungsari. (n.d.). Retrieved October 31, 2023, from <http://Landungsari-malangkab.desa.id/organisasi>